

BAB IV

BAB IV
REFLEKSI STRUKTUR SOSIAL-POLITIK
MASA ORDE BARU (1965-1980)
DALAM DRAMA *MANGIR*

Sebagaimana diuraikan dalam teori sebelumnya bahwa dalam pandangan struktural genetik, memandang karya sastra sebagai produk strukturasi pandangan dunia dan perilaku dari kelompok sosial yang turut melahirkannya. Oleh karena itu, Pramoedya dalam membuat karya drama *Mangir* tidak dapat lepas dari realitas yang konkret. Dalam drama *Mangir* ini, Pramoedya mengangkat realitas perjuangan hak asasi manusia dan penindasan rakyat kecil sebagai bentuk refleksi dari realitas yang dialami dan dirasakannya. Keadaan sosial politik masa Orde Baru pada tahun 1965-1980 merupakan latar acuan dalam drama *Mangir* meskipun ceritanya diangkat dari budaya abad ke-15 dan ke-16 atau awal jaman kerajaan Mataram. Relevansi antara kondisi dan situasi masa Orde Baru sesudah dan sebelum tahun 1976 tersebut dengan jaman kerajaan Mataram justru terkait erat. Hal ini disebabkan adanya struktur budaya (sosial-politik) Orde Baru pada kenyataannya masih mewarisi dari struktur budaya (sosial-politik) Mataram yang disebut feodalisme.

Untuk itu, dalam bab IV ini peneliti akan mencoba membahas relevansi antara struktur naskah drama *Mangir* dengan struktur sosial politik yang konkret. Pembahasan dalam bab ini akan tetap dikaitkan pula dengan hasil analisis dari bab II dan III.

Jadi, dalam pembahasan bab IV ini tetap didasarkan pada struktur teks sebagai wujud refleksi struktur sosial politik yang melatarbelakangi terciptanya drama *Mangir*. Ada beberapa faktor yang mendasari klasifikasi struktur sosial dalam teks sebagai refleksi kelompok sosial/komunitas dari realitas konkretnya.

Pertama, adanya perampasan kedaulatan hidup/kemerdekaan rakyat Mangir oleh penguasa Mataram dalam cerita merupakan refleksi dari kehidupan rakyat yang tertindas hidupnya. Penindasan yang terjadi adalah pengambilan secara paksa wilayah Perdikan Mangir dari rakyatnya bahkan mereka dituntut untuk memberikan upeti atas hasil tanah mereka sendiri. Kesamaan dalam kehidupan yang tertindas baik dalam teks drama *Mangir* maupun realitas yang konkret (baik di dalam Pulau Buru maupun di luar Pulau Buru) merupakan bentuk homologitas karya dengan dunia yang lebih luas.

Kedua, adapun gambaran tokoh penguasa feodal Mataram merupakan refleksi terhadap kelompok sosial penguasa pada masa drama *Mangir* ditulis. Ketiga, kisah Putri Pambayun dapat diisyaratkan sebagai kelompok kaum lemah atau sosok perempuan yang tiada berdaya terhadap kehidupannya sendiri.

Beranjak dari tiga obyek cerita yang digambarkan Pramoedya dalam drama *Mangir* tersebut (berdasarkan bab III) maka pembahasan subbab berikut akan difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu tokoh pejuang kedaulatan Mangir, kisah Putri Pambayun, dan tokoh penguasa feodal Mataram.

Adanya tiga permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dalam drama *Mangir* terdapat refleksi kelompok-kelompok sosial dan masyarakat pada masa Orde Baru. Untuk lebih memahami keterkaitan antara struktur drama *Mangir*

dengan struktur sosial politik yang konkrit maka subbab-subbab berikut akan membahas Struktur kelompok sosial yang tergambar dalam drama *Mangir*, yaitu tokoh pejuang kedaulatan Mangir sebagai kelompok sosial rakyat tertindas, kisah Putri Pambayun sebagai kondisi kelompok sosial perempuan, tokoh penguasa feodal Mataram sebagai kelompok sosial penguasa Orde Baru serta perjuangan Perdikan Mangir sebagai aktivitas demokratisasi dimasa Orde Baru.

4.1 Struktur Kelompok Sosial Masa Orde Baru dalam Drama *Mangir*

4.1.1 Kelompok Sosial Rakyat Tertindas

Baru Klinting dan Wanabaya sebagai tokoh utama dalam perjuangan kedaulatan Perdikan Mangir dalam penelitian ini direpresentasikan sebagai kelompok sosial rakyat yang tertindas karena ulah penguasa Mataram. Apabila dikaitkan dengan hasil penelusuran kelompok sosial/ komunitas Pramoedya maka kelompok rakyat tertindas ini adalah orang-orang yang hidupnya tertindas oleh penguasa Orde Baru, yang hak-hak asasinya tercabut. Banyak para tahanan politik umumnya ditahan dalam penjara tanpa proses hukum yang adil seperti halnya dengan Pramoedya. Kemerdekaan hidup para tapol terampas dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Secara umum, gambaran kehidupan rakyat yang tertindas ini adalah fakta sejarah yang terjadi pada masa Orde Baru. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, tapi sesungguhnya kehidupan rakyat kecil banyak yang tertindas. Kebebasan berbicara, berorganisasi, hidup merdeka, hak-hak kepemilikan ditekan begitu kuat oleh penguasa Orde Baru. Hal ini dapat juga dilihat dalam kehidupan buruh tani awal era 70-an.

Para buruh tani desa atau rakyat kecil menurut Arief menunjukkan bahwa kemiskinan dipedesaan Jawa justru bertambah. Dari 31,1 juta pada tahun 1969/1970 (hasil Susenas IV) menjadi 39,4 juta, pada tahun 1976 (hasil Susenas V). secara relatif terhadap jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menurut patokan nilai beras juga bertambah, dari 52% menjadi 61% (Arief dalam Lubis, 1983: 25). Dengan demikian, nampak bahwa buruh tani pedesaan yang sudah tidak dapat memiliki tanah garapan. Hal tersebut merupakan bukti tidak adanya keadilan sosial dalam pemerataan pembangunan ekonomi yang layak bagi kemanusiaan. Jika dihubungkan dengan pasal 27 ayat 2 yang berisi: "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". maka tampaklah rakyat kecil atau kaum buruh yang tidak terpenuhi haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ini berarti mereka hidup tertindas.

Gambaran kehidupan rakyat tertindas atau rakyat kecil tampak jelas dialami oleh kaum buruh tani di pedesaan dan orang-orang yang berjuang untuk tegaknya kebenaran dan keadilan. Kaum buruh atau kaum proletar menurut Sarjadi (1994:10) dituntut melakukan pekerjaan dalam beberapa fungsi sekaligus, yaitu sebagai buruh pencangkul dan buruh panen serta lainnya. Sehingga jika tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan maka mereka terpaksa berusaha mencari tambahan penghasilan di luar sektor pertanian. Dari tahun 1975 – 1985 ternyata menurut Sarjadi keluarga buruh tani di pedesaan, petani gurem, dan pekerjaan nonpertanian tingkat bawah di pedesaan tidak menunjukkan perubahan apapun

jika dilihat dari tingkat pendapatan perkapitanya karena selalu lebih rendah dari rata-rata pendapatan nasional (1994:15).

Beranjak dari penelitian tersebut menggambarkan adanya penindasan terhadap rakyat desa atau kaum buruh tani dari segi ekonomi serta memarjinalkan mereka dari proses politik. Kemandirian ekonomi dan partisipasi politik rakyat kecil semakin sulit dipertahankan. Hak-hak asasi mereka sebagai rakyat kecil tertindas. Kontrol atas tanah oleh rakyat digeser oleh negara untuk kemudian diberikan pada swasta. “Pembaharuan Struktur Ekonomi – Sosial Desa” menurut Francis dalam Juliantara (2000:44) dinyatakan bahwa kebijakan deregulasi yang kemudian diikuti oleh industrialisasi dipimpin oleh swasta dilindungi oleh negara semi otoriter dan militer. Apabila dikaitkan dengan struktur drama *Mangir* maka akan dapat diperoleh adanya relevansi dan kesamaan antara struktur naskah dengan struktur sosial yang konkret.

Kesamaan tersebut adalah adanya kelompok sosial rakyat yang tertindas akibat ulah penguasa yang sewenang-wenang. Perdikan Mangir sebagai wilayah yang merdeka ditindas hak-hak asasinya oleh penguasa Mataram. Dengan dikuasainya Perdikan Mangir maka hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hak kontrol atas tanah milik rakyat Mangir karena digeser kekuasaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senapati.

Perjuangan kedaulatan Mangir oleh Baru Klinting – Wanabaya dari serangan kerajaan Mataram merupakan bentuk perlawanan terhadap penindasan, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan penguasa. Di samping itu, perjuangan yang dilakukan Baru Klinting – Wanabaya juga merupakan perjuangan demokrasi

oleh pengarang. Hal ini tersirat pula dalam kepemimpinan Dwi Tunggal Tokoh Baru Klinting – Wanabaya dalam mengatur Perdikan Mangir. Ciri-ciri demokrasi terlihat ketika Baru Klinting memecahkan persoalan yang ada dalam Perdikan. Adanya sikap Baru Klinting untuk melibatkan para demang, Wanabaya, dan Putri Pambayun dalam mengatasi konflik-konflik yang ada merupakan ciri-ciri pelaksanaan demokrasi. Kebebasan hak berpendapat, berbicara, dan memilih sikap sangat dijunjung tinggi oleh Baru Klinting. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa pandangan dunia pengarang tertuang melalui tokoh Baru Klinting sebagai wakil dari pendukungnya.

Perjuangan melawan penguasa Mataram oleh tokoh pejuang kedaulatan Mangir merupakan representasi perlawanan terhadap kekuasaan tunggal. Dalam drama *Mangir*, Pramoedya pun secara tersirat mengkritik adanya Dwi Fungsi ABRI yang mendukung kediktatoran penguasa Orde Baru. Dwi Fungsi menurut Pramoedya justru ditunjukkan dalam kolaborasi terhadap tokoh Baru Klinting dan Wanabaya. Hal ini menandakan bahwa Dwi Fungsi ABRI menurut pendapatnya justru harus berpihak kepada kedaulatan rakyat dan bukan berpihak kepada penguasa yang tidak memperhatikan nasib rakyat kecil/ kaum lemah. Penolakan terhadap Dwi Fungsi ABRI semasa penguasa Orde Baru ini pun menjadi agenda program PRD karena menurut mereka adanya Dwi Fungsi ABRI justru kebebasan rakyat berpendapat, berorganisasi, gerak rakyat untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik dimatikan dengan kekerasan, ancaman, bahkan dengan pembunuhan. Tindakan yang tidak menghargai hak asasi manusia ini pun dialami oleh tokoh Putri Pambayun.

4.1.2 Kelompok Sosial Perempuan

Kisah Putri Pambayun dalam drama *Mangir* merupakan representasi kondisi sebagian besar perempuan di masa Orde Baru. Banyak permasalahan perempuan yang menjadi topik keprihatinan para pemerhati masalah perempuan termasuk Pramoedya sendiri. Serangkaian pembahasan perempuan dan gerakan perjuangannya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran permasalahan perempuan di masa Orde Baru sekaligus solusi yang akan diperjuangkan pada masanya.

Kisah Putri Pambayun dalam drama *Mangir* dilukiskan dengan latar penceritaan abad ke-15 dan ke-16, yaitu jaman kerajaan Mataram. Namun, permasalahan yang diangkat oleh Pramoedya dalam drama ini tetap relevan dengan kondisi sosial politik yang konkret. Adanya relevansi tersebut karena nilai-nilai yang dianut dalam menilai seorang perempuan masih mewarisi dari nilai-nilai Jawa pada jaman kerajaan dahulu. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Zainuddin Fananie (2000:116) bahwa kesan wanita Jawa tampak menduduki pada struktur bawah dan jika orang menyimak kedudukan wanita Jawa dalam sejarah raja-raja Jawa yang memandang kaum pria sebagai tema sentral. Hal ini disebut sistem sosial patriarkat masyarakat Jawa.

Kesepakatan Internasional dalam Perisai Perempuan (1999:vi) digambarkan bahwa citra umum yang telah berlaku bagi seorang perempuan yaitu keharusan selalu tunduk terhadap apa saja yang telah ditentukan untuknya. Apabila kisah Putri Pambayun dikaitkan dengan kondisi perempuan Orde Baru maka hal ini dapat dilihat dalam dialog berikut.

Putri Pambayun: (membelalak ketakutan dalam mengingat-mengingat).
Masih ingat sahaya, waktu itu, ayahandanya baginda habis titahkan bunuh kakanda Ranga agar digantung dengan tali Menggigil ketakutan sahaya bersujud pada ayahanda, takut dibunuh maka persembahkan janji bakti, apa saja baginda kehendaki.

(Pramoedya, 2000:50)

Dialog di atas menyatakan perasaan dan sikap Putri Pambayun sebagai seorang perempuan yang tertindas, tertekan, dan tidak memiliki kemerdekaan hidup. Gambaran Putri Pambayun sebagai perempuan tertindas seperti dalam pembahasan bab III merupakan refleksi kondisi yang dialami oleh perempuan-perempuan dimasa Orde Baru yang ingin menentukan sikap dan memperjuangkan kemerdekaan hidupnya.

Kondisi dan peran perempuan ketika masa pembangunan Orde Baru menurut Nursyahbani (2001:54) menunjukkan bahwa selama pembangunan Orde Baru perempuan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Meskipun sering mendapat perlakuan tidak adil dan menghadapi diskriminasi dari penguasa. Dalam ketenagakerjaan sektor domestik, kegiatan kaum perempuan diklasifikasikan sebagai pekerja keluarga tanpa upah.

Kuatnya sistem sosial patriarkat masyarakat Jawa menyebabkan perempuan diperlakukan sebagai objek atau posisinya hanya sebagai alat pembantu sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Dalam bidang politik ketidakberdayaan tersebut tercermin dalam kisah Putri Pambayun. Pramoedya sengaja mengangkat permasalahan perempuan sebagai kepeduliannya terhadap kaum lemah dan yang tertindas. Jadi, dalam drama *Mangir* Putri Pambayun sebagai ajang konflik seorang perempuan yang

lemah dan tidak dapat secara aktif berkiprah diajang politik. Hal ini merupakan representasi kondisi perempuan jaman Orde Baru.

Penguasa Orde Baru menggunakan hukum untuk merepresentasi kelompok yang lemah. Bagaimana Putri Pambayun dibuat harus tunduk terhadap hukum yang dibuat ayahandanya sendiri tanpa bisa mengelak. Sehingga tidak kuasa menentukan dan memilih nasibnya sendiri. Meskipun diakhir cerita, Putri Pambayun tersadar untuk memperjuangkan kemerdekaan hidupnya, melepaskan diri dari belenggu Panembahan Senapati. Apa kemudian yang terjadi ketika Putri Pambayun melakukan usaha perlawanan? Maka pengusiran, hinaan, dan ancaman serta kekerasanlah yang dialami.

Putri Pambayun tidak banyak terlibat dalam pembuatan keputusan. Hal ini berarti perempuan lebih banyak sebagai penikmat keputusan. Adapun keputusan yang dihasilkan cenderung tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan. Keadaan seperti ini membuat perempuan berada di posisi marjinal.

Kondisi dan nasib Putri Pambayun ini pun dalam realitas konkret dapat dilihat pada nasib buruh di Indonesia pada masa Orde Baru. Menurut Dita Indah Sari, Ketua Pusat Perjuangan Buruh Indonesia PRD berpandangan bahwa:

“Gerakan perempuan dan gerakan buruh tidak bisa dipisahkan karena mereka semua dari akar yang sama. Dan, kalau kita bicara demokrasi, tanpa adanya kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, itu omong kosong. Mereka memang harus berjalan berdampingan bersama-sama.”

(Ayu Ratih, 2002: 1)

Pandangan Dita ini dapat diartikan bagaimana kondisi dan nasib perempuan pada masa itu, yakni tidak adanya kesetaraan harkat dan martabat serta mengalami nasib didiskriminasikan dari sebagian besar aspek kehidupan.

Penangkapan, pengucilan, serta perlakuan sewenang-wenang penguasa terhadap perempuan yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan hidup, kesetaraan harkat, dan martabatnya adalah kondisi realitas yang diangkat oleh Pramoedya dalam drama *Mangir* sebagai kritik keras terhadap pemerintah.

Cerita *Mangir* itu sendiri merupakan tema dominan tentang kondisi dan posisi perempuan pada masa kerajaan Mataram yang terwarisi hingga masa Orde Baru dan kemungkinan besar sampai dewasa ini. Rendahnya kedudukan perempuan dan ketidakberdayaan terhadap situasi dan permasalahan yang dihadapi dapat jelas terlihat dalam dialog ini.

Panembahan Senapati: (tanpa menoleh pada Putri Pambayun).
Haram bumi Mataram dengan hadirnya perempuan durjana
hina ini. Keluarkan dia dari Mataram Jaya!
(Cepat meninggalkan panggung).
(Pramoedya, 2000:113)

Perlawanan Putri Pambayun terhadap ayahandanya sebagai raja Mataram terlihat pada implikasinya dalam penyerangan Perdikan Mangir ke kerajaan Mataram. Hal ini juga dapat diartikan sebagai penentangan pengarang terhadap tradisi perlakuan kepada perempuan yang semena-mena. Setidaknya kisah Putri Pambayun dalam drama *Mangir* sebagai suatu fakta sejarah yang terkait dengan stratifikasi sosial dan pola kekuasaan patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai kaum lemah dan ditempatkan pada struktur bawah.

Penentangan Pramoedya akan tradisi perlakuan penguasa Orde Baru terhadap perempuan tersebut digambarkan oleh semangat Putri Pambayun untuk meninggalkan Mataram. Semangat untuk memperjuangkan kedaulatan perempuan, menegakkan harkat dan martabat perempuan serta menghapus

penindasan terhadap kaum lemah tetap berkobar. Beranjak dari gejala struktur sosial politik Orde Baru di atas, Pramoedya merefleksikan kisah Putri Pambayun sebagai kondisi perempuan yang ia temukan semasa pemerintahan Orde Baru berkuasa di Indonesia.

4.1.3 Kelompok Sosial Penguasa

Di dalam suasana masyarakat feodal orientasi pada status sangat tinggi. Setiap perbuatan selalu berkaitan dengan status sosial yang selalu *njaga praja*. Oleh karena itu, atasan selalu menunjukkan simbol kebesarannya agar bawahan hormat, loyal, dan “takut”. Jelas bahwa perilaku dan simbol-simbolnya itu selalu disesuaikan dengan kedudukannya. Konsekuensinya adalah penyesuaian kedudukan dengan atribut yang dikenakan mengarah makin meningginya gaya hidup yang serba gemerlapan. Pesta pora yang setiap kali diadakan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Semuanya ini dikomunikasikan demi kekuasaan yang besar dari seorang raja yang semuanya itu serba *prestigious dan conspicuous consumption* (Kartodirdjo dalam Suhartono, 2001:6).

Suasana masyarakat feodal menurut Kartodirdjo tersebut dapat dilihat dalam drama *Mangir*. Terlihat jelas dalam drama ini bagaimana Panembahan Senapati yang didukung Tumenggung Mandaraka sangat menjunjung dan menunjukkan tingginya status sosial penguasa Mataram dan keturunannya. Serta mempertahankan kehidupan istana yang diagungkan.

Panembahan Senapati dan Tumenggung Mandaraka dalam gaya kepemimpinannya memiliki ciri-ciri yang mengarah pada kepemimpinan feodal

dan otokratis, yaitu orientasi pada status sangat tinggi, raja dianggap sebagai orang yang berhak menjadi pemilik tanah, perlunya penarikan pajak, dan upeti. Sebagaimana dapat dilihat pada masa awal birokrasi, kerajaan Mataram Islam hanya mempunyai empat kawedanan (departemen) dan yang ditonjolkan tidak lebih dari mekanisme birokrasi pemerintahan urusan perang dan pajak. Untuk urusan upeti pada perkembangan selanjutnya pada kekuasaan Orde Baru menjadi budaya suap. Penguasa akan memberikan jaminan kedudukan atau sebagai simbol kepatuhan atau loyalitas terhadap penguasa yang di atasnya.

Setiap kali Mataram 'ngluruk' untuk menaklukkan daerah-daerah lain, yang banyak diceritakan dalam *Serat Babad* adalah senapatinya, *tindhining perang*, *manggalaning ngayuda*, *cucuking lampah*, dan masih banyak lagi istilah yang menunjukkan peran militer (Olthof dalam Suhartono, 2001: 20). Jadi, gaya kepemimpinannya yang feodal dan otokratis melahirkan kepemimpinan yang bersifat militer. Hal ini menurut Fatah (1998:146) dikarenakan titik berat gaya kepemimpinan seperti itu ditekankan pada pendekatan keamanan. Dalam dunia kemiliteran dibutuhkan pendefinisian musuh/lawan serta kawan secara tegas. Oleh karena itu, pihak-pihak siapa saja yang dianggap menghalangi rencana penguasa feodal adalah musuh/ lawan yang harus dilumpuhkan, dihancurkan dengan kekuatan persenjataan atau kekerasan.

Apabila melihat kondisi dan situasi Orde Baru terutama pada masa sastra dan Orde Baru IV sangatlah jelas terdapat keterkaitannya. Banyak media pers dan hasil karya sastra yang dilarang beredar, penerbit dan pengarang banyak yang diancam, ditekan dan dimasukkan dalam tahanan. Begitu pula dalam dunia sosial-

politik tampak adanya kekuasaan tunggal dari penguasa Orde Baru yang menghalangi proses demokratisasi di Indonesia. Hal ini dilihat pada sikap pemerintah ketika mematikan aspirasi pers dan pengarang.

Gaya kepemimpinan penguasa Orde Baru merupakan warisan dari kepemimpinan kerajaan Jawa, dalam hal ini model kepemimpinan Mataram. Kemudian gaya pemimpin feodal dan otokratis tersebut diperkuat oleh kolonial Belanda. Menurut Suhartono (2001:30) birokrasi tradisional yang dibina oleh kerajaan-kerajaan khususnya kerajaan agraris feodal telah memberi dasar pemerintahan kerajaan yang berlaku di seluruh nusantara. Suhartono menambahkan ketika kolonial Belanda datang ke wilayah nusantara hal ini berarti munculnya kekuatan eksternal yang berusaha menghancurkan kerajaan-kerajaan nusantara dan VOC mampu menerobos dengan kekuatan ekonomi militer sambil berkolusi untuk menghadapi pemberontak kerajaan.

Para birokrat kolonial juga meniru gaya birokrat tradisional dengan tujuan agar rakyat tidak merasa berbeda “tua”. Hal ini merupakan cara untuk melancarkan atau melicinkan jalan eksploitasi, khususnya lewat perkebunan (Suhartono, 2001:61).

Jadi jelaslah, bagaimana kaum feodal yang menguasai budaya kepemimpinan Indonesia terutama era Orde Baru. Penguasa Orde Baru tenggelam pada gaya hidup feodal yang memberikan jaminan kesejahteraan dan kemewahan hidup dan dampaknya masih terlihat sampai dewasa ini.

Pada masa Orde Baru sangat dikendalikan oleh dunia kemiliteran, yaitu dengan adanya Dwi Fungsi ABRI. Hal ini jelas membuktikan bagaimana

penguasa dalam memimpin cenderung menekankan pada pendekatan keamanan dan persenjataan. Aktivitas DOM di Aceh pada masa 70-an sampai 80-an adalah bukti pendekatan kekerasan atau persenjataan dalam menghadapi suatu keadaan. Munculnya gerakan perlawanan oleh rakyat pada masa Orde Baru ini karena adanya tekanan dan aturan dari pemerintah. Bagaimana protes buruh mulai merebak untuk menolak kebijaksanaan pemerintah dalam upah minimum buruh.

Ciri lain dalam kepemimpinan feodal, yaitu adanya kasus Putri Pambayun “sebagai persembahan” untuk Wanabaya. Gambaran ini adalah bentuk lain dari raja yang memberikan *triman* berupa wanita. Panembahan Senapati mengawinkan putri sulungnya sebagai cara untuk “membeli” kedaulatan Perdikan *Mangir*. Apabila dikaitkan dengan masa Orde Baru menurut Suhartono (2001:136) bahwa pemerintah terpaksa membeli “suara rakyat” setiap menjelang Pemilu dengan berbagai proyek serta fasilitas lain agar rakyat percaya bonafiditas pemerintah. Pemberian sesuatu kepada pihak lain dimaksudkan agar mereka melakukan sesuatu atau mengikuti perintah pemberi adalah tindakan biasa. Meskipun hal ini sudah berlaku sangat luas tetapi tidak dirasakan sebagai suatu penyimpangan.

Menghadapi penyimpangan yang sudah membudaya tersebut, Pramoedya melakukan kritik atau penolakan terhadap budaya yang dianggapnya menyimpang ini. Bentuk kritiknya tersebut diolah dalam drama *Mangir* dengan bentuk cerita Wanabaya dengan Putri Pambayun. Kisah ‘bersatunya’ Wanabaya – Putri Pambayun justru bukan untuk melanggengkan hubungan feodal Mataram –

Mangir tapi sebagai simbol penolakan terhadap sistem *triman* tersebut yang berakhir pada penyerangan istana Mataram.

Dari semua gejala tersebut dilihat bahwa sedikit banyak proses kultural dalam sistem politik Indonesia saat ini telah terbentuk oleh sebuah sistem pola kekuasaan tradisional Jawa, misalnya, dalam konteks pelaksanaan pembangunan sekarang ini yang selalu berorientasi ke pusat dengan budaya “mohon petunjuk” sebelum suatu program dilaksanakan telah membuktikan bahwa sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa telah merasuki sistem politik pemerintahan Orde Baru (Akhmad Setiawan, 1998:54).

Jadi, tokoh penguasa Mataram dalam drama *Mangir* dapat dikatakan sebagai refleksi kelompok sosial penguasa feodal masa Orde Baru. Untuk lebih jelasnya perhatikan ikhtisar gaya kepemimpinan Tumenggung Mandaraka – Panembahan Senapati sebagai penguasa feodal Mataram yang mengarah pada kepemimpinan penguasa Orde Baru.

Ciri dan Gaya Kepemimpinan	
Penguasa Feodal Mataram	Penguasa Orde Baru
1. Kekuasaan adalah memusat (sentralistis), terkonsentrasi serta berkecenderungan menghisap kekuasaan lain/ Perdikan Mangir.	1. Kekuasaan dikendalikan oleh pemerintahan pusat dan dikuasai oleh partai yang dominan, yaitu Golkar. Fraksi politik lain tidak dibenarkan, berposisi terhadap pemerintahan pusat. Karena kekuasaan sentralistis maka tidak ada otonomi daerah secara penuh.

<p>2. Kekuasaan berasal dari alam adikodrati yang tunggal (wakil Tuhan) dan bukan dari rakyat.</p>	<p>2. Penguasa yang terpilih tidak boleh digulingkan sehingga bertujuan untuk berkuasa selamanya. Implikasinya selama 32 tahun dalam pemerintahan Orde Baru ada Soeharto adalah calon tunggal presiden dalam pemilu.</p>
<p>3. Benar-salah ada di tangan raja Panembahan Senapati.</p>	<p>3. Selama kepemimpinan Orde Baru di bawah kekuasaan presiden Soeharto tidak ada justifikasi/ keabsahan secara moral sehingga tidak mengharuskan pemegang kekuasaan bertanggung jawabkan segala perbuatannya kepada rakyat.</p>
<p>4. Penyelesaian konflik dengan pendekatan peperangan</p>	<p>4. Kekuasaan bersifat militerisme sehingga penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan.</p>
<p>5. Tidak memberi kesempatan pada tokoh lain (Putri Pambayun, Rangga) untuk aktif mengambil keputusan secara bersama.</p>	<p>5. Kebebasan berpendapat dan memilih sikap ditekan dengan adanya penangkapan aktivis politik, pembredelan media surat kabar, dan hasil karya sastra yang menyuarakan aspirasi rakyat.</p>

Dengan demikian, dilihat dari hal di atas, nilai-nilai feodal masih mengakar dalam budaya Indonesia sehingga masih dapat dilihat suatu keadaan yang mengorbankan hak-hak golongan bawah yang dapat diartikan rakyat, para petani, buruh, kaum perempuan, dan lain-lain.

Kalau dilihat dari perbandingan model kepemimpinan tokoh penguasa feodal Mataram dan penguasa Orde Baru mempunyai kesamaan sifat, yaitu monopolistik. Menurut Eriyanto (2000:40) monopolistik merupakan konsep kekuasaan Jawa yang tidak mengenal pembagian kekuasaan.

Ada dua cara mengumpulkan kekuasaan dalam tradisi Jawa, yakni dengan cara menyerap kekuasaan yang ada disekitarnya atau menghancurkannya sama sekali. Cara pertama dipakai kalau raja atau penguasa belum merasa kuat (Eriyanto, 2000:40). Cara pertama ini dipraktekkan oleh Panembahan Senapati ketika membangun kerajaan Mataram sehingga dikenal tipu muslihat mengelabui tokoh pejuang kedaulatan Mangir (Baru Klinting – Wanabaya) dengan memberikan *triman* ronggeng cantik Putri Pambayun, putri sulungnya sendiri. Untuk konsep menyerap atau mengumpulkan kekuasaan dengan jalan menyerang penguasa daerah lain, merupakan konsep yang dipraktekkan pula penguasa Orde Baru.

Menurut Eriyanto (2000:41) secara terencana Soeharto menguasai satu persatu kekuatan di masyarakat sehingga tunduk dalam kekuasaannya. Sebagai seorang penguasa ia tidak menginginkan kekuatan lain disekitarnya dan tidak ingin dikritik karena dapat dianggap membahayakan kekuatannya. Konsep

penguasa Orde Baru tersebut merupakan konsep kekuasaan otoriter dan feodal.

Dalam teks drama *Mangir* dapat dilihat dalam dialog sebagai berikut.

Panembahan Senapati: Sahaya hanya anak wayang di atangan Yang Maha Kuasa. Pesaing dan pelawan Mataram, semua yang masih tegak dan berdiri, wajib runder berkiat pada takhta ini. Mataram tak sudi berbagi. Mataram berdiri berarti, Yang Maha Kuasa kodratkan semua jadi miliknya. Yang melintang patah, yang membujur gugur, yang tegar rebah. Karena, ayahanda, tak ada gunanya Yang Maha Kuasa benarkan putranda jadi raja, bila yang lain-lain tidak dikodratkan merangkak di bawah kakinya.

(Pramoedya, 2000:97)

Jadi, dapat dikatakan dalam kepemimpinan Panembahan Senapati-Tumenggung Mandaraka dengan Penguasa pada masa Orde Baru kurang memandang persamaan derajat atau hukum yang berkeadilan sosial bagi rakyatnya.

4.2 Perilaku Demokratisasi oleh Baru Klinting dalam Humanisme Proletar

Berkaitan dengan pandangan humanisme proletar, dalam drama *Mangir* tersirat adanya perilaku demokratisasi yang digambarkan oleh kepemimpinan Baru Klinting. Humanisme proletar memiliki kesadaran terhadap pembelaan kaum lemah atau rakyat kecil. Untuk mewujudkan suatu kemanusiaan yang membela pada rakyat kecil/ tertindas mutlak diperlukan adanya suasana demokratis dalam tatanan kehidupan bernegara. Tanpa adanya kepemimpinan yang demokratis mustahil nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan.

Gaya kepemimpinan yang demokratis diwakili oleh tokoh Baru Klinting.

Hal ini tampak dalam ikhtisar berikut

Konsep Kepemimpinan Baru Klinting	Konsep Demokrasi
1. Tidak menjadikan Mangir sebagai kerajaan (menolak sistem kerajaan yang memegang kekuasaan absolut di tangan raja.	1. Menolak cara hidup dogmatis yang memegang kebenaran absolut. Sistem yang mempraktekkan pemilihan pemimpin lewat pemilihan umum yang bebas dan adil (Robert Bartley).
2. Menegakkan kedaulatan Perdikan Mangir dengan melawan penindasan kerajaan Mataram.	2. Bertujuan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
3. Mengajak aktif komponen dalam Perdikan Mangir (Wanabaya, Putri Pambayun, dan para demang) dalam mengambil keputusan.	3. Menghargai kebebasan berbicara dan bersikap. Menumbuhkan manusia kritis, rasional, toleran, dan menomorsatukan evaluasi kritis sebagai motor kemajuan masyarakat.
4. Menyelesaikan konflik dengan jalan dialogis dan mengatur penyerahan ke istana Mataram secara bersama.	4. Penyelesaian dengan pendekatan penghargaan pada setiap perbedaan tanpa perlu cap musuh (Fatah dalam <i>Dilema Demokrasi Pluralis</i>).

Adanya sikap penolakan terhadap sistem kerajaan dan melibatkan tokoh-tokoh lain untuk berunding dalam menyelesaikan masalah Wanabaya, menunjukkan bahwa Baru Klinting mempunyai sikap yang demokratis. Kesempatan untuk berbicara yang diberikan Baru Klinting pada Putri Pambayun untuk mengakui jati dirinya dan membela diri dihadapan para demang mengisyaratkan adanya sikap menghargai dan toleransi terhadap orang lain.

Demokratisasi yang dilaksanakan Baru Klinting dalam Perdikan Mangir melahirkan aktivitas sosial politik yang memandang nilai-nilai kemanusiaan demi

kepentingan rakyat Mangir. Semua pihak (baik Wanabaya, para demang maupun Putri Pambayun) diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut nasib dan hak-hak mereka. Terlihat jelas, sikap Baru Klinting dalam setiap pengambilan keputusan memperhatikan kepentingan bersama dan menentang adanya kekuasaan absolut.

Pembelaan Baru Klinting terhadap kaum lemah dalam drama *Mangir* diwakilkan oleh Putri Pambayun adalah sebuah sikap yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama kaum perempuan. Sikap tersebut tercermin ketika Baru Klinting tetap memberi kesempatan kepada Putri Pambayun untuk menunjukkan bukti kesetiaan dan kecintaannya pada Wanabaya (Perdikan Mangir). Baru Klinting tidak semena-mena dalam menangani kasus Putri Pambayun tersebut. posisi perempuan tidak diletakkan pada tempat yang inferior seperti halnya pada tokoh penguasa feodal Mataram.

Makna yang dapat diambil dari analisis ini secara totalitas adalah perjuangan untuk membela atau berpihak kepada kaum lemah/perempuan dan rakyat yang tertindas kehidupannya demi mewujudkan nilai kemanusiaan yang sesungguhnya bagi rakyat.

Pada dasarnya lawan dari humanisme proletar adalah feodalisme, kapitalisme. Karena feodalisme atau kapitalisme menumbuhkan kepemimpinan yang otokratis/ otoriter. Dalam sistem kepemimpinan ini maka kepentingan rakyat akan diabaikan demi kepentingan negara (penguasa).

Dengan demikian, jelaslah dalam drama *Mangir* aktivitas atau perilaku Baru Klinting dalam mempengaruhi kepemimpinan Wanabaya merupakan sebuah

proses demokratisasi yang menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan demi kepentingan rakyat kecil dan kaum lemah. Perjuangan Baru Klinting dan Wanabaya sebagai tokoh pejuang kedaulatan Mangir merupakan wujud keberpihakannya pada rakyat yang tertindas/kaum lemah. Pembelaan atau keberpihakan tokoh pejuang kedaulatan Mangir tersebut melalui perlawanannya pada tokoh penguasa feodal Mataram. Medan pertentangan (*oposisi biner*) terletak antara kelompok sosial rakyat tertindas (Perdikan Mangir) melawan penguasa (kerajaan Mataram). Rakyat desa *versus* penguasa istana.

Beranjak dari hasil analisis bab IV ini, dapat ditemukan adanya homologi antara teks drama *Mangir* dengan dunia yang lebih luas (realitas). Gambaran kelompok sosial dan struktur sosial-politik masyarakat masa Orde Baru (1965-1980) terefleksi dalam teks dengan jelas sehingga mempunyai relevansi dengan realitas konkret yang melatarbelakanginya. Adapun gambaran aktivitas politik tokoh kedaulatan Mangir dalam mengatur wilayahnya juga menawarkan nilai perilaku demokratisasi demi mewujudkan kemanusiaan yang berpihak pada rakyat tertindas/kaum lemah. Nilai demokratisasi demi mewujudkan humanisme proletar merupakan nilai yang ditawarkan Pramoedya untuk melawan sistem feodalisme yang dianggapnya lebih menindas rakyat kecil.

BAB V